

**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY - GAP**

BARIS 1	SKPD	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
	PROGRAM	Pengelolaan Keuangan Daerah
	KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	TUJUAN	Menyusun buku rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
BARIS 2	Pembuka Wawasan (data terpilah Gender)	DATA UMUM: Akses : Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak : 31 OPD.
		Partisipasi : Pengelola keuangan yang mampu mengelola penganggaran keuangan dengan baik.
		Kontrol : Jumlah proporsi laki-laki dan perempuan yang mengelola keuangan daerah.
		Manfaat : Terkelolanya keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel
BARIS 3	ISU GENDER Faktor Kesenjangan/ permasalahan (akses, kontrol, manfaat, partisipasi)	Akses : Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh
		Partisipasi : Rumusan kegiatan penyusunan APBD TA 2024 dan APBD Kota Payakumbuh yang akan didasari dengan analisis gender.
		Kontrol : Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk issu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Manfaat : Belum terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
BARIS 4	Sebab Kesenjangan internal (di OPD)	1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab issu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius.

			2. Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh.
BARIS 5		Sebab Kesenjangan eksternal	Kurangnya komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah mengenai responsif gender.
BARIS 6		Tujuan Responsif Gender	Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan Pertanggungjawaban APBD Kota Payakumbuh .
BARIS 7		Rencana aksi	Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.
BARIS 8	Pengukuran Hasil	Output	<p>Rumusan Kinerja Output :</p> <p>Menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>Indikator kinerja Output :</p> <p>Tercapainya penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD tepat waktu</p>
BARIS 9		Outcome	<p>Rumusan Kinerja Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender. 2. Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh. <p>Indikator kinerja Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dengan mencantumkan pada kegiatan dengan memberi kode gender yang telah diusulkan dalam KUA dan PPAS. 2. Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). 3. Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Maret 2023
An. KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001

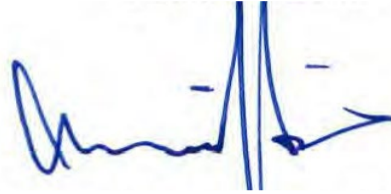
**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY - GAP**

BARIS 1	SKPD	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
	PROGRAM	Pengelolaan Keuangan Daerah
	KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
	TUJUAN	Menyusun buku rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BARIS 2	Pembuka Wawasan (data terpilah Gender)	DATA UMUM: Akses : Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak : 31 OPD.
		Partisipasi : Pengelola keuangan yang mampu mengelola pelaporan keuangan dengan baik.
		Kontrol : Jumlah proporsi laki-laki dan perempuan yang mengelola keuangan daerah.
		Manfaat : Terkelolanya keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel
BARIS 3	ISU GENDER Faktor Kesenjangan / permasalahan (akses, kontrol, manfaat, partisipasi)	Akses : Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh.
		Partisipasi : Rumusan kegiatan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang harus didasari dengan analisis gender.
		Kontrol : Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

			<p>Manfaat : Belum terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.</p>
BARIS 4		Sebab Kesenjangan internal (di OPD)	Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan belum ditanggapi dengan serius.
BARIS 5		Sebab Kesenjangan eksternal	Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh.
BARIS 6		Tujuan Responsif Gender	Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan.
BARIS 7		Rencana Aksi	Pengguna anggaran wajib menyampaikan setiap penggunaan anggaran pembangunan yang menjadi kewenangan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban
BARIS 8	Pengukuran Hasil	Output	<p>Rumusan Kinerja Output : Menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>Indikator Kinerja Output : Tercapainya penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu</p>
BARIS 9		Outcome	<p>Rumusan Kinerja Output : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun setiap penggunaan anggaran pembangunan yang menjadi kewenangan OPD sebagai pengguna anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban</p> <p>Indikator Kinerja Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dan dicantumkan pada kegiatan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan dibahas bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh). 3. Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan

			Walikota Payakumbuh tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh.
--	--	--	---

Payakumbuh, Maret 2023
An. KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001

BADAN KEUANGAN DAERAH

JLN VETERAN KOMPLEK KANTOR WALIKOTA PAYAKUMBUH

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) TAHUN 2024

SKPD	:	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
KODE KEGIATAN	:	5. 02. 02. 2.01. 07
ANALISIS SITUASI	:	<p>1. Data Pembuka Wawasan (data terpilah Gender) :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD.b. Tidak adanya pemisahan sumber dana yang dapat meningkatkan kemajuan organisasi perempuan.c. Tidak adanya jumlah kegiatan yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender :</p> <p>a. Akses :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Study kelayakan pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ada kepastian dalam penganggaran terhadap responsif gender dari pemerintah daerah Kota Payakumbuh.2. Rumusan kegiatan penyusunan APBD Kota Payakumbuh belum didasari dengan analisis gender.3. Study aspek sosial (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat termasuk isu gender) masih belum jadi perhatian dalam penyusunan APBD Kota Payakumbuh. <p>b. Penyebab Internal :</p> <ul style="list-style-type: none">3. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius.4. Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan APBD Kota Payakumbuh. <p>c. Penyebab Eksternal :</p> <p>Kurangnya komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah mengenai responsif gender.</p>
RENCANA		Kegiatan :

TINDAK		Tujuan	Terakomodirnya kegiatan yang responsif Gender pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah agar rancangan Perda dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
		Aktivitas	1. Menghimpun data sesuai dengan KUA dan PPAS. 2. Verifikasi RKA SKPD. 3. Rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD (Banggar)
		Sumber Daya (inputs)	Dana : sebesar Rp. 1.842.018.900,- SDM : TAPD dengan anggota sebanyak 45 orang. Peralatan : computer, laptop, printer
		Output	Rumusan Kinerja : Menyusun Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja : Tercapainya penetapan APBD tepat waktu
ALOKASI SUMBER DAYA	:	Jumlah Anggaran Kegiatan :	Belanja untuk Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.842.018.900,-
		SDM	TAPD dengan anggota sebanyak 45 orang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD.
		Peralatan dan mesin	Komputer, laptop, printer
OUTCOMES		Rumusan Kinerja:	1. Pemerintah daerah dapat merencanakan penganggaran untuk responsif Gender dengan memberi kode/tagging pada indikator kegiatan. 2. Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

	<p>Indikator kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none">(1) OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dengan mencantumkan pada kegiatan dengan memberi kode gender yang telah diusulkan dalam KUA dan PPAS.(2) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender.(3) Kegiatan yang telah dihimpun akan diakomodir dalam penjabaran APBD berupa rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh.(4) Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh).(5) Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD .(6) Penjabaran APBD Kota Payakumbuh di rinci untuk masing-masing kegiatan OPD dengan menyusun DPA SKPD.
--	---

Payakumbuh, Maret 2023
An. KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001

BADAN KEUANGAN DAERAH

JLN VETERAN KOMPLEK KANTOR WALIKOTA PAYAKUMBUH

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) TAHUN 2024

SKPD	:	BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
PROGRAM	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	:	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
KODE KEGIATAN	:	5. 02 .02. 2.03. 05
ANALISIS SITUASI	:	<p>1. Data Pembuka Wawasan (data terpilah Gender) :</p> <p>d. Jumlah OPD di Kota Payakumbuh sebanyak 31 OPD, dimana akan terus dilakukan pembinaan kepada pelaksana keuangan dan penatusahaan serta pembuat laporan pertanggungjawaban terkait adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender :</p> <p>d. Akses :</p> <p>4. Pemahaman pelaksana pembuat laporan keuangan OPD yang belum merata sehingga perlu dilakukan pembinaan agar meratanya informasi peraturan terkait pengelolaan keuangan.</p> <p>e. Penyebab Internal :</p> <p>5. Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Keuangan Daerah belum mengetahui perspektif gender sebab isu gender belum dianggap penting dan ditanggapi dengan serius.</p> <p>6. Tenaga yang memberikan pembinaan didominasi oleh perempuan.</p> <p>f. Penyebab Eksternal :</p> <p>1. Belum terbangunnya hubungan responsif gender antara OPD, dimana OPD belum mampu merekomendasikan sesuai dengan aturan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh.</p> <p>2. OPD mengirimkan SDM yang tersedia dan mau melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tanpa memperhatikan atau responsif gender.</p>

RENCANA TINDAK		Kegiatan :	
		Tujuan	Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
		Aktivitas	4. Melaksanakan pembinaan berupa bimbingan teknis maupun sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan terhadap pelaksana yang responsif gender Melakukan verifikasi data. 5. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh akan menghimpun semua kegiatan yang telah berkode gender 6. Kegiatan yang telah dihimpun akan masuk ke dalam penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa rancangan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh.
		Sumber Daya (inputs)	Dana : sebesar Rp. 67.825.750,- SDM : Tim Pertanggungjawaban APBD Peralatan : computer, laptop, printer
		Output	Rumusan Kinerja : Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Indikator kinerja : Meningkatnya informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh
	ALOKASI SUMBER DAYA	:	Jumlah Anggaran Kegiatan :
		SDM	dengan anggota yang mewakili Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD, Inspektorat.

	Peralatan dan mesin	Komputer, laptop, printer
OUTCOMES	<p>Rumusan Kinerja:</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat</p> <p>Indikator kinerja :</p> <p>(7) OPD menyusun kegiatan yang dianggap sudah mengakomodir responsif gender dan dicantumkan pada kegiatan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.</p> <p>(8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD akan dibahas dengan bersama dengan Badan Anggaran Legislatif (DPRD Kota Payakumbuh).</p> <p>(9) Setelah melalui proses evaluasi oleh Propinsi Sumatera Barat maka ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Payakumbuh.</p>	

Payakumbuh, Maret 2023
An. KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Drs. BASNIDA EFRIZAL, M. Si
NIP. 19710412 199101 1 001